



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 34
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 23 Juni 2015
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: 1. Membahas Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015; 2. Membahas Evaluasi Pelaksanaan DOB dan Grand Design Otonomi Daerah; 3. Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I dan II Tahun 2014
Ketua Rapat	: <b>Rambe Kamarul Zaman/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 31 Anggota Komisi II DPR RI

## **I. PENDAHULUAN**

- A. Raker/RDP Komisi II DPR RI pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 dibuka pada pukul 10.45 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015; Evaluasi Pelaksanaan DOB dan Grand Design Otonomi Daerah; dan Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I dan II Tahun 2014.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan untuk memberikan penjelasan dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan pertanyaan terkait dengan pemaparan yang disampaikan.

## II. KESIMPULAN

- A. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri & Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mampu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Tahun 2014. Namun demikian Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri & BNPP untuk lebih mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang hingga saat ini masih dalam proses, sesuai dengan rekomendasi BPK;
- B. Terhadap 65 RUU Daerah Otonom Baru dan 22 RUU Daerah Otonom Baru yang merupakan Usul Inisiatif DPR RI Periode 2009-2014, Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri sepakat untuk mengagendakan Rapat Kerja yang akan membahas secara khusus terkait kelanjutan 65 RUU Daerah Otonom Baru dan 22 RUU Daerah Otonom Baru dan usulan baru lainnya;
- C. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah melakukan upaya-upaya dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak tahun 2015, dalam hal penyiapan regulasi dan koordinasi dukungan Pemerintah Daerah, namun demikian Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dapat terus menyempurnakan regulasi yang dipandang perlu untuk Pilkada berkualitas, demokratis, efisien, aman, dan partisipatif untuk mengantisipasi praktek-praktek tidak sehat dan memastikan penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak Tahun 2015 secara konsisten;
- D. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk lebih mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2015 terkait belum ditandatangani NPHD di 9 daerah, anggaran bagi Bawaslu dan Panwaslu di 50 daerah, serta anggaran pengamanan untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.35 WIB.

**Jakarta, 23 Juni 2015**  
**Ketua Komisi II DPR RI**

**ttd**  
**Rambe Kamarul Zaman**  
**A-236**